Jurnal Inspirasi – Vol.1, No.3 Januari – Juni 2018
ISSN 2598-4268

PENGEMBANGAN MATERI DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Isnaini
Undaris Semarang
e-mail: isnaini2601@gmail.com

Abstract

Indonesia is one of the biggest multikultural country in the world. This fact can be seen from social culture condition or geographical are very diverse and extensive. This diversity is rocornized or not be various problems like corruption, colution, nepotism, poverty, violence, environmental destruction, separatism and losing in humanity to respect people right other, based on the above problems, then a special strategy is needed to solve the problems through various fields such as Islamic religious education. So that educators need to instill the students the importance of religion in quality, not quantity, to be able to cultivate a humanist attitude, pluralist and democratic, the students need a religious education curriculum and materials are insighful and growing. So it doesn't stuck on primordialism and ekslusivism religious groups and a narrow culture.

Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Kenyataan ini dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Keragaman ini diakui atau tidak akan dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, kemiskinan, kekerasan, perusakan lingkungan, separatisme, dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk menghormati hak-hak orang lain, merupakan bentuk nyata sebagai bagian dari multikulturalisme tersebut.Berdasarkan permasalahan di atas, maka diperlukan strategi khusus untuk memecahkan persoalan tersebut melalui berbagai bidang diantaranya adalah melalui pendidikan agama Islam. Sehingga para pendidik perlu menanamkan kepada anak didik pentingnya beragama secara kualitas, bukan kuantitas. Untuk dapat menumbuhkan sikap humanis, pluralis dan demokratis para anak didik perlu kiranya dikembangkannya kurikulum dan materi Pendidikan agama yang berwawasan multikultural. Sehingga tidak terjebak pada primordialisme dan eklusivisme kelompok agama dan budaya yang sempit.

Kata Kunci: Pendidikan, Agama, Kenakalan Remaja

A. Pendahuluan

Indonesia—negara yang memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 memang memiliki keanekaragaman yang amat kompleks. Mulai dari ras dan suku yang beragam dan tersebar dalam beribu-ribu pulau yang ada, agama yang beragam, baik itu agama global (Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu, Konghucu) hingga agama-agama lokal, semisal Kejawen di Jawa. Bahasa, lingkungan, adat, kebiasaan, hingga makanan yang sangat bervariasi dalam wilayah Indonesia. Oleh karena itu, tidaklah salah bila Indonesia disebut sebagai negara multi-budaya, multi-etnis, dan multi-agama.

Sesungguhnya, keragaman yang dimiliki oleh Indonesia tersebut bila dikelola secara benar akan menghasilkan kekuatan positif bagi pembangunan bangsa.

Namun, bila tidak dimanfaatkan dan dikelola secara benar, maka kemajemukan bisa menjadi faktor destruktif dan dapat menimbulkan bencana yang dahsyat (Ki Supriyoko, 2004 : 4). Pertikaian di Ambon, Kupang, Sampit, Sambas, Poso, Maluku, dan beberapa tempat lainnyaadalah contoh dari realitas konflik yang disebabkan karena perbedaan dalam masyarakat tersebut. Konflik tersebut terus terjadi hampir secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya dan menjadi bagian dari kemajemukan dan multibudaya yang tidak dikelola dengan baik. Sifat realitas kekerasan dan konflik sosial di Indonesia yang aktual sekaligus menyejarah telah membenarkan anggapan bahwa kekerasan hampir menjadi setelan mental (*mind-set*) kolektif, maupun individual bangsa Indonesia (Sutanto, L. : 2003).

Berdasarkan permasalahan seperti diatas maka pendidikan multikulturalisme menawarkan satu altrnatif melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan berbasis pemanfaatan keragaman yang ada dimasyarakat. Khususnya yang ada pada siswa seperti: keragaman etnis, budaya, bahasa ,agama, status sosial, gender, kemampuan umur dan ras. Walaupun pendidikan multikultural merupakan pendidikan relatif baru di dalam dunia pendidikan.

Sebelum perang dunia II boleh dikatakan pendidikan multikultural belum dikenal. Malah pendidikan dijadikan sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan yang memonopoli sistem pendidikan untuk kelompok atau golongan tertentu. Dengan kata lain pendidikan multikultural meupakan gejala baru dalam pergaulan umat manusia yang mendambakan persaman hak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama untuk semua orang. Dalam penerapan strategi dan konsep pendidikan multikultural yang terpenting dalam strategi ini tidak hanya bertujuan agar supaya siswa mudah memahami pelajaran yang dipelajari, akan tetapi juga akan meningkatkan kesadaran mereka agar selalu berperilaku humanis, pluraklis dan demokratis. Begitu juga seorang guru tidak hanya menguasai materi secara professional tetapi juga harus mamapu meneanamkan nilai-nbilai inti dari pendidikan multikultural sepreti : humanisme, demokratis dan pluralisme.

Wacana pendidikan multikultural salah satu isu yang mencuat kepermukan di era globalisasi seperti saat ini mengandaikan, bahwa pendidikan sebagai ruang tranformasi budaya hendaknya selalu mengedepankan wawasan multikultural, bukan monokultural. Untuk memperbaiki kekurangan dan kegagalan, serta memebongkar praktik-praktik diskriminatif dalam proses pendidikan. Sebagaimana yang masih kita ketahui peranginya dalam dunia pendidikan nasional kita,bahkan hingga saat ini.

Dalam konteks ini, pendidikan multikultural merupakan pendekatan progresif, pendekatan ini sejalan dengan prinsif penyelenggaraan pendidikan yang termaktub dalam undang undang dan sistem pendidikan (SISDIKNAS) tahun 2003 pasal 4 ayat 1,yang berbunyi bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskrinminatif dengan menjunjung tinggi hak asai manusia (HAM), nilai agama, nilai kultur, dan kemajemukan bangsa.

Pendidikan multikultural juga didasarkan pada keadilan sosial dan persamaan hak dalam pendidikan. Dalam doktrin islam,ada ajaran kita tidak boleh membeda-beda etnis, ras dan lain sebagainya. Manusia sama, yang membedakan adalah ketaqwaan kepada Allah SWT. Dalam kaitanya dengan pendidikan multikultural hal ini mencerminkan bagaimana tingginya penghargaan islam terhadap ilmu pengetahuan,dalam islam tidak ada pembedaan dan pembatasan diantara manusia dalam haknya untuk menuntut atau memperoleh ilmu pengetahusn.

Wajah monokulturalisme didunia pendidikan kita masih kentara sekali bila kita tilik dari berbagai dimensi pendidikan. Mulai dari kuirikulum, materi pelajaran, hingga metode pengajaran yang disampaikan oleh guru dalam proses belajar mengajar (PBM) diruang kelas hingga penggalan-penggalan terakhir dari abad ke-20 sistem penyelenggaraan pendidikan di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan keseragaman *(Etatisme)* lengkap dengan kekuassaan birokrasi yang ketat, bahkan otoriter. Dalam kondisi seperti ini, tuntutan dari dalam dan luar negeri akan pendekatan yang semakin seragam dan demokratis terus mendesak dan perlu di implementasikan (H.A.R. Tilaar, 2004 : 24).

Di sinilah pendidikan multikultural menjadi sangat penting karena dengan pendidikan multikultural kesadaran akan nilai multikultur tersebut dapat

dikembangkan. Terlebih di Indonesia, pendidikan (formal) yang berkembang adalah melalui lembaga-lembaga pendidikan. Melalui lembaga-lembaga pendidikan itulah mutu, kepandaian, keterampilan dan pengetahuan seseorang diciptakan. Melalui lembaga pendidikan tersebut, doktrin-doktrin dan penanaman "pengetahuan" dilahirkan. Karenanya, kesadaran multikulturalisme akan dapat tercipta dengan baik manakala ditanamkan sejak awal melalui jalur pendidikan. Pendidikan dengan basis kultural akan sangat membantu seseorang untuk mengerti, memahami serta menerima perbedaan sebagai sebuah keniscayaan yang harus dihargai dan dihormati sehingga akan tumbuh pemahaman akan relativitas nilai budaya. Diharapkan para generasi penerus menjadi "Generasi Multikultural" yang menghargai perbedaan, selalu menegakan nilai-nilai demokrasi, keadilan dan kemanusiaan yang akan datang.

B. Pembahasan

1. Latar Belakang Pendidikan Multikultural

Secara garis besar multikulturalisme dapat dipahami sebagai sebuah paham yang menekankan pada kesederajatan dan kesetaraan budaya-budaya lokal tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya lain. Sebagai sebuah ide, pendidikan multikultural dibahas dan diwacanakan pertama kali di Amerika dan negara-negara Eropa Barat pada tahun 1960-an (Ali Maksum dkk, 2007 : 281). oleh gerakan yang menuntut diperhatikannya hak-hak sipil (*civil right movement*). Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk mengurangi praktik diskriminasi di tempat-tempat publik, di rumah, di tempat-tempat kerja, dan di lembaga-lembaga pendidikan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas (Parsudi Suparlan, 2002 : 2-3).Gerakan hak-hak sipil ini, menurut James A. Bank, berimplikasi pada dunia pendidikan, dengan munculnya beberapa tuntutan untuk melakukan reformasi kurikulum pendidikan yang sarat dengan diskriminasi. Sehingga pada awal tahun 1970-an bermunculan sejumlah kursus dan program pendidikan yang menekankan pada aspek-aspek yang berhubungan dengan etnik dan keragaman budaya (*cultural diversity*). Begitu juga keberadaan masyarakat dengan individu-individu yang beragam latar belakang bahasa dan kebangsaan (*nationality*), suku (*race or etnicity*), agama (*religion*), gender, dan

kelas sosial (*socialclass*) dalam suatu masyarakat juga berimplikasi pada keragaman latar belakang peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan (Ali Maksum, 2007 : 281) sehingga turut melatarbelakangi berkembangnya pendidikan multikultural.

Dalam konteks Indonesia, peserta didik di berbagai lembaga pendidikan diasumsikan juga terdiri dari peserta didik yang memiliki beragam latar belakang agama, etnik, bahasa, dan budaya. Menurut Leo Suryadinata (2003) asumsi ini dibangun berdasarkan pada data bahwa di Indonesia terdapat 250 kelompok suku, 250 lebih bahasa lokal (*lingua francka*), 13.000 pulau, dan 6 agama resmi.Paling tidak keragaman latar belakang siswa di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia terdapat pada paham keagamaan, afiliasi politik, tingkat sosial ekonomi, adat istiadat, jenis kelamin, dan asal daerahnya (perkotaan atau pedesaan).

Perbincangan tentang konsep pendidikan multikultural di Indonesia semakin memperoleh momentum pasca runtuhnya rezim otoriter militeristik orde baru karena hempasan badai reformasi. Era reformasi ternyata tidak hanya membawa berkah bagi bangsa kita namun juga memberi peluang meningkatnya kecenderungan primordialisme. Untuk itu, dirasakan kita perlu menerapkan paradigma pendidikan multikultural untuk menangkal semangat primordialisme (M. Ainul Yakin, 2005 : 56). Paradigma pendidikan multikultural dalam konteks ini memberi pelajaran kepada kita untuk memiliki apresiasi respek terhadap budaya dan agama-agama orang lain. Atas dasar ini maka penerapan multikulturalisme menuntut kesadaran dari masing-masing budaya lokal untuk saling mengakui dan menghormati keanekaragaman budaya yang dibalut semangat kerukunan dan perdamain. Paradigma multikultural secara implisit juga menjadi salah satu *concern* dari pasal 4 UU No.20 tahun 2003 sistem pendidikan nasional. Dalam pasal itu dijelaskan, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Dalam pandangan Ricardo L. Garcia yang dikutip Abdullah Aly (http://psbps.org/index.php?option=com_content&task= view&id=60&Itemid=71, diunduh 30 Nopember 2011) kemunculan pendidikan multikultural terpengaruh

dengan adanya teori sosial *cultural pluralism*: *mosaic analogy* yang dikembangkan oleh Berkson. Teori ini berpandangan bahwa masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang beragam latar belakang agama, etnik, bahasa, dan budaya, memiliki hak untuk mengekspresikan identitas budayanya secara demokratis. Teori ini sama sekali tidak meminggirkan identitas budaya tertentu, termasuk identitas budaya kelompok minoritas sekalipun. Bila dalam suatu masyarakat terdapat individu pemeluk agama Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu, maka semua pemeluk agama diberi peluang untuk mengekspresikan identitas keagamaannya masing-masing. Bila individu dalam suatu masyarakat berlatar belakang budaya Jawa, Madura, Betawi, dan Ambon, misalnya, maka masing-masing individu berhak menunjukkan identitas budayanya, bahkan diizinkan untuk mengembangkannya. Masyarakat yang menganut teori ini, terdiri dari individu yang sangat pluralistik, sehingga masing-masing identitas individu dan kelompok dapat hidup dan membentuk mosaik yang indah. Untuk konteks Indonesia, teori ini sejalan dengan semboyan negara Indonesia, *Bhinneka Tunggal Ika.* Secara normatif, semboyan tersebut memberi peluang kepada semua bangsa Indonesia untuk mengekspresikan identitas bahasa, etnik, budaya, dan agama masing-masing, dan bahkan diizinkan untuk mengembangkannya.

Sementara Donna M. Gollnick menyebutkan bahwa pentingnya pendidikan multikultural dilatarbelakangi oleh beberapa asumsi: (1) bahwa setiap budaya dapat berinteraksi dengan budaya lain yang berbeda, dan bahkan dapat saling memberikan kontribusi; (2) keragaman budaya dan interaksinya merupakan inti dari masyarakat Amerika dewasa ini; (3) keadilan sosial dan kesempatan yang setara bagi semua orang merupakan hak bagi semua warga negara; (4) distribusi kekuasaan dapat dibagi secara sama kepada semua kelompok etnik; (5) sistem pendidikan memberikan fungsi kritis terhadap kebutuhan kerangka sikap dan nilai demi kelangsungan masyarakat demokratis; serta (6) para guru dan para praktisi pendidikan dapat mengasumsikan sebuah peran kepemimpinan dalam mewujudkan lingkungan yang mendukung pendidikan multikultural (http://www.educationworld.com, diunduh 30 Nopember 2011).

Pendidikan berbasis multikultural membantu siswa mengerti, menerima, dan menghargai orang dari suku, budaya, nilai, dan agama berbeda. Atau dengan kata yang lain, siswa diajak untuk menghargai – bahkan menjunjung tinggi – pluralitas dan heterogenitas. Paradigma pendidikan multikultural mengisyaratkan bahwa individu siswa belajar bersama dengan individu lain dalam suasana saling menghormati, saling toleransi dan saling memahami (Nurani Soyomukti, 2010 : 141).

2. Pendidikan Agama di Tengah Multikulturalisme

Pendidikan diberi tanggungjawab untuk menciptakan rasa kemanusiaan, moral dan kepribadian yang mendukung terjadinya kedamaian di masyarakat melalui penyebaran pengetahuan, wawasan, dan spirit bagi generasi (anak-anak, remaja, pemuda secara khusus dan rakyat secara umum). Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan, oleh karena itu, kebudayaan dan peradaban yang maju (yang mana masyarakatnya sejahtera, damai, kreatif, produktif, dan suka keindahan) pastilah didukung dengan pendidikan yang berhasil. (Nurani Soyomukti, 2010 : 138)

Memperbincangkan pendidikan (agama) Islam pada hari ini biasanya memunculkan gambaran pilu dalam pikiran kita tentang ketertinggalan, kemunduran, dan kondisi yang serba tidak jelas (Abd. Rachman Assegaf, 2009 : 15-16). Begitu juga disinyalir bahwa sistem pendidikan nasional yang selama ini berlaku menunjukkan fenomena yang tidak menguntungkan bagi pembentukan proses kultural (M. Ainul Yakin, 2005 : 191).

Pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional mempunyai tanggung jawab (*moral obligation*) dalam penyebaran nilai-nilai pluralisme, multikulturalisme, inklusivisme dan toleransi. Namun kenyataannya pendidikan agama Islam yang selama ini diajarkan di sekolah, pesantren, madrasah dan institusi Islam lainnya turut memberikan kontribusi ekslusivisme dalam Islam.

Kautsar Azhari Noer menyebutkan paling tidak ada empat faktor penyebab kegagalan tersebut, yaitu: *pertama,* penekanannya lebih pada proses transfer ilmu agama ketimbang pada proses transformasi nilai-nilai keagamaan dan moral kepada anak didik; *Kedua,* sikap bahwa pendidikan agama tidak lebih dari sekedar

sebagai "hiasan kurikulum" belaka atau sebagai "pelengkap" yang dipandang sebelah mata; *Ketiga,* kurangnya penekanan pada nilai-nilai moral yang mendukung kerukunan antaragama, seperti cinta, kasih sayang, persahabatan, suka menolong, suka damai dan toleransi, dan; *Keempat,* kurangnya perhatian untuk mempelajari agama-agama lain.(*http://www.wahanakebangsaan.org/index.php?option=com_content&task=view&id =42&Itemid=33*, diunduh 30 Nopember 2011).

Sedangkan Muhaimin mengidentifikasi bahwa kegagalan pendidikan agama Islam setidaknya disebabkan karena mengalami kekurangan dalam dua aspek mendasar, yaitu: 1) pendidikan agama masih berpusat pada hal-hal yang bersifat simbolik, ritualistik, serta bersifat legal formalistik (halal-haram) dan kehilangan ruh moralnya; 2) kegiatan pendidikan agama cenderung bertumpu pada penggarapan ranah kognitif dan paling banter hingga ranah emosional. Kadang-kadang terbalik dengan hanya menyentuh ranah emosional tanpa memerhatikan ranah intelektual. Akibatnya tidak dapat terwujud dalam perilaku siswa dikarenakan tidak tergarapnya ranah psikomotik (Muhaimin, 2003 : 71).Atau dalam praktiknya, pendidikan agama berubah menjadi pengajaran agama, sehingga tidak mampu membentuk pribadi-pribadi Islami (Sumartana, dkk., 2001 : 239-240).Menurut Harun Nasution (1995 : 425), pendidikan agama banyak dipengaruhi oleh *trend* Barat yang lebih mengutamakan pengajaran daripada pendidikan moral. Padahal, intisari pendidikan agama justru terletak pada pendidikan moral tersebut.

Selain itu, ada juga beberapa kelemahan lainnya, yaitu: 1) dalam bidang teologi, ada kecenderungan mengarah pada paham fatalistik; 2) bidang akhlak yang hanya berorientasi pada urusan sopan santun dan belum dipahami sebagai keseluruhan pribadi manusia beragama; 3) bidang ibadah diajarkan sebagai kegiatan rutin agama dan kurang ditekankan sebagai proses pembentukan kepribadian; 4) dalam bidang hukum (fiqih) cenderung dipelajari sebagai tata aturan yang tidak akan berubah sepanjang masa, dan kurang memahami dinamika dan jiwa hukum Islam; 5) agama Islam cenderung diajarkan sebagai dogma dan kurang mengembangkan rasionalitas serta kecintaan pada kemajuan ilmu

pengetahuan; 6) orientasi mempelajari al-Qur'an masih cenderung pada kemampuan membaca teks, belum mengarah pada pemahaman arti dan penggalian makna (Muhaimi, et.al, 2002 : 89).

Dalam konteks berbeda, M. Amin Abdullah dalam Abdul Munir Mulkhan (1998 : 65) melihat beberapa kelemahan pelaksanaan pendidikan agama di sekolah, yaitu: 1) pendidikan agama lebih banyak terkonsentrasi pada persoalan-persoalan teoritis keagamaan yang bersifat kognitif semata serta amalan-amalan ibadah praktis; 2) pendidikan agama kurang *concern* terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi "makna" dan "nilai" yang perlu diinternalisasikan dalam diri anak didik lewat berbagai cara, media dan forum; 3) isu kenakalan remaja, perkelahian di antara pelajar, tindak kekerasan, premanisme, *white color crime,* konsumsi miras, dan sebagainya, walaupun tidak secara langsung, memiliki kaitan dengan metodologi pendidikan agama yang selama ini berjalan secara konvensional-tradisional; 4) metodologi pendidikan agama tidak kunjung berubah antara *pra* dan *post* era modernitas; 5) pendidikan agama lebih menitikberatkan pada aspek korespondensi-tekstual, yang lebih menekankan hafalan teks-teks keagamaan yang sudah ada; 6) dalam sistem evaluasi, bentuk-bentuk soal ujian agama Islam menunjukkan prioritas utama pada kognitif dan jarang pertanyaan tersebut mempunyai bobot muatan "nilai" dan "makna" spiritual keagamaan yang fungsional dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, orientasi pendidikan agama Islam selama ini juga kurang tepat. Sebagai indikator kekurangtepatan tersebut adalah adalah: *Pertama,* pendidikan agama saat ini lebih berorientasi pada belajar tentang agama sehingga hasilnya banyak orang mengetahui nilai-nilai ajaran agama, tetapi perilakunya tidak relevan dengan nilai-nilai ajaran agama yang diketahuinya.

Kedua, tidak tertibnya penyusunan dan pemilihan materi-materi pendidikan agama sehingga sering ditemukan hal-hal yang prinsipil yang mestinya dipelajari lebih awal, tetapi justru terlewatkan. Demikian pula materi pendidikan agama lebih berorientasi pada pemilihan disiplin ilmu fiqih yang sering dianggapnya seolah-olah agama itu sendiri. Bahkan masyarakat menilai bahwa beragama yang benar identik dengan madzhab fiqih yang benar dan diakui mayoritas. Ketika

berbeda sedikit saja dengan madzhab yang dianut mayoritas, maka dituduh sebagai aliran sesat dan menyimpang. Berdasarkan hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan pada buku ajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di salah satu kota besar di Indonesia ditemukan bahwa buku ajar PAI tersebut belum sepenuhnya mencerminkan visi penghargaan terhadap hak asasi manusia (Fahrurrozi, 2005 : 168).

Ketiga, kurangnya penjelasan yang luas dan mendalam serta kurangnya penguasaan semantik dan generik atas istilah-istilah kunci dan pokok dalam ajaran agama, sehingga sering ditemukan penjelasannya yang sangat jauh dan berbeda dari makna, spirit dan konteksnya. Hal ini berimplikasi pada munculnya anggapan bahwa ajaran-ajaran agama yang dipegang dan dianggap benar oleh pemeluknya adalah ajaran-ajaran agama yang sudah menjadi sejarah ratusan tahun lamanya, yang kadang-kadang kita sendiri tidak mengetahui darimana sumbernya (Komaruddin Hidayat, 1999 : xii-xiii).

Orientasi semacam itu menyebabkan keterpisahan dan kesenjangan antara ajaran agama dan realitas perilaku pemeluknya. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi dalam pembelajaran agama Islam. Dalam kerangka ini, setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan. *Pertama*, mempelajari Islam untuk kepentingan mengetahui bagaimana cara beragama yang benar. *Kedua*, mempelajari Islam sebagai sebuah pengetahuan. Dengan kata lain, belajar agama adalah untuk membentuk perilaku beragama yang memiliki komitmen, loyal dan penuh dedikasi, yang sekaligus mampu memosisikan diri sebagai pembelajar, peneliti dan pengamat yang kritis untuk peningkatan dan pengembangan keilmuan (Komaruddin Hidayat, 1999 : xii-xiii).

Oleh karena itu, untuk membentuk pendidikan yang mampu menghasilkan manusia yang memiliki kesadaran multikulturalisme, diperlukan rekonstruksi pendidikan sosial keagamaan untuk memperteguh dimensi kontrak sosial keagamaan dalam pendidikan agama. Maksudnya, kalau selama ini praktik di lapangan pendidikan agama masih menekankan sisi keselamatan yang dimiliki dan didambakan oleh orang lain di luar diri dan kelompoknya sendiri, maka pendidikan agama perlu direkonstruksi kembali, agar lebih menekankan proses

edukasi sosial yang tidak semata-mata individual dan memperkenalkan *social contract.* Dengan demikian, pada diri peserta didik, tertanam suatu keyakinan bahwa kita semua sejak semula memang berbeda-beda dalam banyak hal, lebih-lebih dalam bidang akidah, iman, kredo. Namun, demi menjaga keharmonisan, keselamatan dan kepentingan kehidupan bersama, mau tidak mau harus rela menjalin kerja sama dalam bentuk sosial antarsesama kelompok warga masyarakat. Dengan reorientasi ini, diharapkan akan terjadi perubahan proses dan mekanisme pembelajaran menuju ke arah terciptanya pemahaman dan kesadaran multikultural kepada anak didik (Ngainum Naim dan Ahmad Syauqi, 2008 : 188).

Sebetulnya pendidikan agama memiliki signifikansi dan kontribusi yang cukup penting dalam penanaman kesadaran akan pluralitas agama dan kebenaran di era multikulturalitas seperti sekarang ini. Pendidikan agama yang apologetik, reaktif dan tidak afirmatif terhadap umat beragama akan menjadi bumerang bagi pemeluk agama yang bersangkutan. Dalam hubungannya dengan hal ini, penting untuk digarisbawahi bagaimana fungsi institusi pendidikan Islam mendudukkan dirinya di tengah pluralitas nilai dan norma kerohanian masyarakat. Dalam hal ini anak dididik untuk bersikap saling menghargai identitas agama-agama dan kepercayaan apapun yang ada.

Kekhawatiran dan kemasygulan beberapa kalangan bahwa pendidikan multikultural akan mendegradasi keimanan dan tidak sesuai dengan tuntutan fundamental dalam Islam, adalah kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Karena dalam konteks pendidikan multikulturalisme ini, peserta didik tidak diajarkan untuk menihilkan semua nilai dan bahkan merelatifisasinya melainkan tetap untuk mengetahui bahwa Islam adalah agama yang paling benar sembari tidak menutup kemungkinan adanya kebenaran lain di luar Islam. Salah satu tujuan dari pendidikan multikultural adalah pendidikan Islam yang tidak menjurus *truth claim.*

Pendidikan multikultural berusaha menanamkan pada anak didik pentingnya beragama secara kualitas, bukan kuantitas. Mereka diajarkan bagaimana mengedepankan substansi daripada simbol-simbol agama. Pesan-pesan agama universal agama seperti keadilan, kejujuran dan toleransi. semuanya merupakan

nilai-nilai yang perlu untuk dikembangkan dalam masyarakat plural. Setidaknya peran aktif yang dapat dikerjakan oleh para aktivis pendidikan adalah mengembangkan disain kurikulum dan metode pendidikan agama yang mampu menumbuhkan sikap saling menghargai antarpemeluk agama dan kepercayaan. Di sinilah pentingnya pendidikan agama lintas kepercayaan (*inter-religious education*) (Sholahuddin, 2005 : 118).

3. Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Multikultural

Kurikulum dapat dimaknai sebagai *a plan of learning,* yaitu sebuah perencanaan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Ronald C. Doll yang dikutip Ngainun Naim (2008 : 189) mengatakan "kurikulum merupakan pengalaman yang ditawarkan kepada anak didik di bawah bimbingan dan arahan sekolah".Dengan demikian,kurikulum merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan multikultural.

Pengembangan kurikulum masa depan yang berdasarkan pendekatan multikulturalisme ini menjadi sangat penting. Namun sebelum lebih jauh memperbincangkan mengenai kurikulum pendidikan agama Islam berwawasan multikultural, terlebih dahulu akan mengawali pembahasannya pada definisi dan tujuan pendidikan multikultural. Pembahasan tentang definisi dan tujuan ini penting untuk dilakukan, dengan alasan bahwa pemahaman terhadap definisi dan tujuan pendidikan multikultural ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan kurikulum pendidikan agama Islam berwawasan multikultural.

Definisi pendidikan multikultural sangat banyak dan beragam (Choirul Mahfud, 2006 : 167). Di antaranya disebutkan bahwa pendidikan multikural merupakan:

Suatu program dan praktik pendidikan yang didesain untuk memperbaiki pencapaian akademik pada kelompok etnis dan imigran dan mengajarkan pada kelompok masyarakat yang mayoritas tentang budaya-budaya dan pengalaman-pengalaman kaum minoritas tersebut (*http://re-searchengines.com/muhaemin6-04.html*, akses 1 September 2011).

1. Suatu pengetahuan yang menanamkan kesadaran diri seseorang akan arti perbedaan antarsesama manusia dan berbagai budaya dan nilai-nilai yang

terdapat di dalamnya. Dengan kesadaran tersebut diharapkan dapat digunakan untuk merespon perubahan demografis dan kultural dari suatu masyarakat atau bahkan dunia secara keseluruhan dan dapat digunakan untuk hidup saling menghargai, tulus dan toleran dalam menghadapi keragaman tersebut (Torsten Husen dan T. Neville Postlethwaite (Ed.), 1994 : 3961-3962).

2. Suatu pendekatan progresif untuk pentransformasian pendidikan yang kritis-holistik dan berpusat pada kelemahan, kegagalan dan diskriminasi dalam praktek-praktek pendidikan (*http://www.exchange.org/multikultural/index.html*, akses 1 September 2011).
3. Pendidikan multikultural diartikan sebagai pendidikan untuk people of colour. Dalam artian bahwa pendidikan multikultural merupakan bentuk pendidikan yang arahnya untuk mengeksplorasi berbagai perbedaan dan keragaman, karena perbedaan dan keragaman merupakan suatu keniscayaan (James A. Banks, 1997 : 17).
4. Pendidikan multikultural merupakan pengembangan kurikulum dan aktivitas pendidikan maupun sebagai respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok (Choirul Mahfud, 2006 : 169).
5. Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran (agama) (Ainurrafiq Dawam, 2003 : 100).

Dari berbagai definisi di atas, dapat diketahui bahwa pendidikan multikultural secara luas dimaksudkan untuk memberikan perhatian akademik terhadap kelompok yang termarjinalkan dan memberikan pengetahuan budaya mengenai kelompok tersebut pada kelompok mayoritas. Hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir perbedaan dan konflik yang mungkin timbul.

Sedangkan dalam arti sempit, pendidikan multikutural adalah suatu program dalam praktik pendidikan yang di dalamnya tidak hanya dikembangkan potensi

manusia namun juga ditanamkan mengenai pemahaman dan pernghargaan akan keserba-majemukan manusia, sehingga akan terpatri sikap tulus dan toleran tanpa adanya diskriminasi dan ketidakadilan di dalamnya.

James A. Banks mengatakan bahwa pendidikan multikural meliputi tiga hal, yaitu pendidikan multikultural sebagai ide atau konsep, sebagai gerakan reformasi dan sebagai suatu proses. Sebagai suatu ide, pendidikan multikultural di arahkan pada keharusan memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang sama bagi setiap siswa tanpa memandang dari kelompok mana mereka berasal. Sebagai suatu gerakan reformasi pendidikan, pendidikan multikultural mencoba untuk merubah kurikulum dan miliu sekolah maupun institusi pendidikan sehingga tercipta pendidikan yang tidak diskriminatif, yang toleran, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Adapun sebagai suatu proses, pendidikan multikultural mempunyai tujuan terciptanya keadilan dan kebebasan bagi setiap siswa, toleransi, dan kesamaan dalam dunia pendidikan, sehingga hal tersebut harus ditingkatkan (proses) secara terus menerus (James A. Banks, 1997 : 6).

Konsep dasar pendidikan multikultural dikatakan oleh Bennet terdiri dari dua hal, yaitu nilai-nilai inti (*core values*) dari pendidikan multikultural dan tujuan pendidikan multikultural. Bennet secara tegas menyebutkan bahwa nilai inti dari pendidikan multikultural, antara lain: 1) apresiasi terhadap realitas budaya di dalam masyarakat dengan pluralitasnya; 2) pengakuan terhadap harkat manusia dan hak asasi manusia; 3) kesadaran dan pengembangan tanggung jawab manusia terhadap alam raya (H.A.R. Tilaar, 2003 : 170-171). Dengan demikian, inti permasalah pendidikan multikultural adalah terkait denga permasalahan keadilan sosial, demokrasi, dan hak asasi manusia(H.A.R. Tilaar, 2003 : 167).

Sedangkan tujuan pendidikan multikultural yaitu:

1. Tujuan *attitudinal* (sikap), yaitu membudayakan sikap sadar, sensitif, toleran, respek terhadap identitas budaya, responsif terhadap berbagai permasalahan yang timbul di masyarakat.
2. Tujuan kognitif, yaitu terkait dengan pencapaian akademik, pembelajaran berbagai bahasa, memperluas pengetahuan terhadap kebudayaan yang

spesifik, mampu menganalisa dan menginterpretasi tingkah laku budaya dan menyadari adanya perspektif budaya tertentu.

3. Tujuan instruksional, yaitu menyampaikan berbagai informasi mengenai berbagai kelompok etnis secara benar di berbagai buku teks maupun dalam pengajaran, membuat strategi tertentu dalam menghadapi masyarakat yang plural, menyiapkan alat yang konseptual untuk komunikasi antarbudaya dan untuk pengembangan ketrampilan, mempersiapkan teknik evaluasi dan membuka diri untuk mengklarifikasi dan penerangan mengenai nilai-nilai dan dinamika budaya.
   (*http://maulanusantara.wordpress.com/2008/04/30/pendidikanmultikultural-dalam-tinjauan-pedagogik/*, akses 30 Nopember 2011).

Lebih jauh, fenomena sosial-budaya seperti wacana multikultural juga penting untuk dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Menurut Hamid Hasan, masyarakat dan bangsa Indonesia memiliki tingkat keragaman yang tinggi, mulai dari dimensi sosial, budaya, aspirasi politik, dan kemampuan ekonomi. Keragaman tersebut berpengaruh langsung terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan kurikulum. Kemampuan sekolah dalam menyediakan pengalaman belajar juga berpengaruh dalam mengolah informasi menjadi sesuatu yang dapat diterjemahkan sebagai hasil belajar. Keragaman itu menjadi suatu variabel bebas yang memiliki kontribusi signifikan terhadap keberhasilan implementasi kurikulum yang ada, baik kurikulum sebagai proses maupun kurikulum sebagai hasil. Oleh karena itu, keragaman tersebut harus menjadi faktor yang seyogianya diperhitungkan dan dipertibangkan dalam penentuan filsafat, teori, visi, pengembangan dokumen, sosialisasi, dan pelaksanaan kurikulum (Hamid Hasan, 2000 : 102).

Kurikulum dan materi pendidikan multikultural bagaimana pun tidak dapat terlepas dari dimensi perkembangan pendidikan multikultural. Yang dimaksud dengan kurikulum pendidikan multikultural bukan berarti terdapat mata pelajaran untuk pengembangan pendidikan multikultural, namun pendidikan multikultural mendasari dan menjiwai berbagai mata pelajaran bahkan di setiap mata pelajaran(H.A.R. Tilaar, 2003 : 229),tak terkecuali pendidikan agama Islam.

Kurikulum pendidikan multikultural tidak dapat terlepas dari muatan-muatan (komponen-komponen) tertentu. Adapun komponen yang termasuk di dalam kurikulum pendidikan multikultural, antara lain tentang studi etnis, minoritas, gender, kesadaran kultur, hubungan antarsesama manusia, dan pengklarifikasian nilai-nilai dalam suatu kebudayaan. Hal-hal tersebut termasuk pula mengenai konsep rasisme, perbedaan jenis kelamin, keadilan, diskriminasi, opresi, perbedaan dan semacamnya (Ainun Hakiemah, 2007 : 35-36).

Secara konseptual, pendidikan multikultural menurut Gorsky yang dikutip Ali Maksum dkk (2007 : 306) mempunyai tujuan dan prinsip sebagai berikut:

1. Setiap siswa mempunyai kesempatan untuk mengembangkan prestasi mereka
2. Siswa belajar bagaimana belajar dan berpikir secara kritis
3. Mendorong siswa untuk mengambil peran aktif dalam pendidikan, dengan menghadirkan pengalaman-pengalaman mereka dalam konteks belajar
4. Mengakomodasi semua gaya belajar siswa
5. Mengapresiasi kontribusi dari kelompok-kelompok yang berbeda
6. Mengembangkan sikap positif terhadap kelompok-kelompok yang mempunyai latar belakang berbeda
7. Untuk menjadi warga negara yang baik di sekolah maupun di masyarakat
8. Belajar bagaimana menilai pengetahuan dari perspektif yang berbeda
9. Untuk mengembangkan identitas etnis, nasional dan global
10. Mengembangkan keterampilan-keterampilan mengambil keputusan dan analisis secara kritis sehingga siswa dapat membuat pilihan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan prinsip-prinsip pendidikan multikultural yaitu:

1. Pemilihan materi pelajaran harus terbuka secara budaya didasarkan pada siswa. Keterbukaan ini harus menyatukan opini-opini yang berlawanan dan interpretasi-interpretasi yang berbeda
2. Isi materi pelajaran yang dipilih harus mengandung perbedaan dan persamaan dalam lintas kelompok

3. Materi pelajaran yang dipilih harus sesuai dengan konteks waktu dan tempat
4. Pengajaran semua pelajaran harus menggambarkan dan dibangun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dibawa siswa ke kelas.
5. Pendidikan hendaknya memuat model belajar mengajar yang interaktif agar supaya mudah dipahami.

Dari uraian-uraian mengenai pendidikan multikultural tersebut dapatlah dipahami bahwa inti pendidikan multikultural ini adalah dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang serba-majemuk.

Pendidikan agama Islam yang diberikan baik di sekolah-sekolah, madrasah-madrasah maupun di pesantren-pesantren, hendaknya terintegrasi dengan spirit pendidikan multikultural ini. Oleh karena itu, dalam pengembangan kurikulum PAI masa depan dengan yang berwawasan multikultural menurut Hamid Hasan (2000 : 102) haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: 1) keragaman budaya menjadi dasar dalam menentukan filsafat, teori, model, dan hubungan sekolah dengan lingkungan sosial-budaya setempat; 2) keragaman budaya menjadi dasar dalam mengembangkan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, proses dan evaluasi; 3) budaya di lingkungan unit pendidikan adalah sumber belajar dan objek studi yang harus dijadikan bagian dari kegiatan anak didik, dan 4) kurikulum berperan sebagai media dalam mengembangkan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional.

Pendidikan agama Islam perlu segera menampilkan ajaran-ajaran Islam yang toleran melalui kurikulum pendidikannya dengan tujuan dan menitikberatkan pada pemahaman dan upaya untuk bisa hidup dalam konteks perbedaan agama dan budaya, baik secara individual maupun secara kolompok; dan tidak terjebak pada primordialisme dan eklusivisme kelompok agama dan budaya yang sempit. Dari titik ini, sikap-sikap pluralisme itu diharapkan akan dapat ditumbuhkembangkan dalam diri generasi muda. Oleh karenanya, dalam upaya pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam perlu diperhatikan dimensi-dimensi berikut ini:

1. Pendidikan agama seperti fiqih dan tafsir tidak harus bersifat linier, namun menggunakan pendekatan *muqoron* (perbandingan). Ini menjadi sangat penting, karena anak tidak hanya dibekali pengetahuan atau pemahaman tentang ketentuan hukum dalam fiqih atau makna ayat yang tunggal, namun juga diberikan pandangan yang berbeda. Tentunya, bukan sekedar mengetahui yang berbeda, namun juga diberikan pengetahuan tentang mengapa bisa berbeda.
2. Untuk mengembangkan kecerdasan sosial, siswa juga harus diberikan pendidikan lintas agama. Hal ini dapat dilakukan dengan program dialog antar agama yang perlu diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Islam. Sebagai contoh, dialog tentang puasa yang bisa menghadirkan para bikhsu atau agamawan dari agama lain. Program ini menjadi sangat strategis, khususnya untuk memberikan pemahaman kepada siswa bahwa ternyata puasa itu juga menjadi ajaran saudara-saudara kita yang beragama Budha. Dengan dialog seperti ini, peserta didik diharapkan akan mempunyai pemahaman khususnya dalam menilai keyakinan saudara-saudara kita yang berbeda agama.
3. Untuk memahami realitas perbedaan dalam beragama, lembaga-lembaga pendidikan Islam bukan hanya sekedar menyelenggarakan dialog antar agama, namun juga menyelenggarakan program *road show* lintas agama. Program *road show* lintas agama ini adalah program nyata untuk menanamkan kepedulian dan solidaritas terhadap komunitas agama lain. Hal ini dengan cara mengirimkan siswa-siswa untuk ikut kerja bhakti membersihkan tempat-tempat umum bersama-sama dengan penganut agama lain. Kesadaran pluralitas bukan sekedar hanya memahami keberbedaan, namun juga harus ditunjukkan dengan sikap konkrit bahwa sekalipun berbeda keyakinan, namun tetap saudara dan dapat saling membantu antar sesama.
4. Untuk menanamkan kesadaran spiritual, pendidikan Islam perlu menyelenggarakan program seperti *Spiritual Work Camp* (SWC), hal ini bisa dilakukan dengan cara mengirimkan siswa untuk ikut dalam sebuah

keluarga selama beberapa hari, termasuk kemungkinan ikut pada keluarga yang berbeda agama. Siswa harus melebur dalam keluarga tersebut. Ia juga harus melakukan aktifitas sebagaimana aktifitas keseharian dari keluarga tersebut. Jika keluarga tersebut petani, maka ia harus pula membantu keluarga tersebut bertani dan sebagainya. Ini adalah suatu program yang sangat strategis untuk meningkatkan kepekaan serta solidaritas sosial. Pelajaran penting lainnya, adalah siswa dapat belajar bagaimana memahami kehidupan yang beragam. Dengan demikian, siswa akan mempunyai kesadaran dan kepekaan untuk menghargai dan menghormati orang lain.

5. Pada bulan Ramadhan, adalah bulan yang sangat strategis untuk menumbuhkan kepekaaan sosial pada anak didik. Dengan menyelenggarakan program sahur *on the road,* misalnya. Karena dengan program ini, dapat dirancang sahur bersama antara siswa dengan anak-anak jalanan. Program ini juga memberikan manfaat langsung kepada siswa untuk menumbuhkan sikap kepekaan sosial, terutama pada orang-orang di sekitarnya yang kurang mampu (*http://pendis.depag.go.id/cfm/index.cfm?fuseaction=KajianBerita&Sub=11&Berita_ID=10515*, akses 30 Nopember 2011).

Pendidikan agama Islam melalui ajaran akidahnya, perlu menekankan pentingnya persaudaraan umat beragama. Pelajaran akidah, bukan sekedar menuntut pada setiap peserta didik untuk menghapal sejumlah materi yang berkaitan denganya, seperti iman kepada Allah Swt., Nabi Muhamad Saw., dan lain-lain. Tetapi sekaligus juga menekankan arti pentingya penghayatan keimanan tadi dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, akidah harus berbuntut dengan amal perbuatan yang baik atau *akhlak al-karimah* pada peserta didik. Memiliki akhlak yang baik pada Tuhan, alam dan sesama umat manusia.

Pendidikan Islam harus sadar, bahwa kerusuhan-kerusuhan bernuansa SARA seperti yang sering terjadi di Indonesia ini adalah akibat ekspresi keberagamaan yang salah dalam masyarakat kita, seperti ekspresi keberagamaan yang masih bersifat ekslusif dan monolitik serta fanatisme untuk memonopoli kebenaran

secara keliru. Celakanya, ekspresi keagamaan seperti itu merupakan hasil dari pendidikan agama. Pendidikan agama dipandang masih banyak memproduk manusia yang memandang golongan lain (tidak seakidah) sebagai musuh. Maka di sinilah perlunya menampilkan pendidikan agama yang fokusnya adalah bukan semata kemampuan ritual dan keyakinan tauhid, melainkan juga akhlak sosial dan kemanusiaan.

Pendidikan agama, merupakan sarana yang sangat efektif untuk menginternalisasi nilai-nilai atau akidah inklusif pada peserta didik. Perbedaan agama di antara peserta didik bukanlah menjadi penghalang untuk bisa bergaul dan bersosialisasi diri. Justru pendidikan agama dengan peserta didik berbeda agama, dapat dijadikan sarana untuk menggali dan menemukan nilai-nilai keagamaan pada agamanya masing-masing sekaligus dapat mengenal tradisi agama orang lain. Target kurikulum agama Islam harus berorientasi pada akhlak. Dalam persoalan syariah, sering umat Islam juga berbeda pendapat dan bertengkar. Maka dalam hal ini pendidikan Islam perlu memberikan pelajaran fiqih *muqoron* untuk memberikan penjelasan adanya perbedaan pendapat dalam Islam dan semua pendapat itu sama-sama memiliki argumen, dan wajib bagi kita untuk menghormati. Sekolah tidak menentukan salah satu mazhab yang harus diikuti oleh peseta didik, pilihan mazhab terserah kepada mereka masing-masing.

Melalui suasana pendidikan seperti itu, tentu saja akan terbangun suasana saling menenami dalam kehidupan beragama secara dewasa, tidak ada perbedaan yang berarti diantara perbedaan manusia yang pada realitasnya memang berbeda. Tidak dikenal superior ataupun inferior, serta memungkinkan terbentuknya suasana dialog yang memiliki peluang untuk membuka wawasan spritualitas baru tentang keagamaan dan keimanan masing-masing.

Pendidikan Islam harus memandang iman, yang dimiliki oleh setiap pemeluk agama, bersifat dialogis artinya iman itu bisa didialogkan antara Tuhan dan manusia dan antara sesama manusia. Iman merupakan pengalaman kemanusiaan ketika berintim dengan-Nya (dengan begitu, bahwa yang menghayati dan menyakini iman itu adalah manusia, dan bukannya Tuhan), dan pada tingkat

tertentu iman itu bisa didialogkan oleh manusia, antarsesama manusia dan dengan menggunakan bahasa manusia.

Tujuan untuk menumbuhkan saling menghormati kepada semua manusia yang memiliki iman berbeda atau mazhab berbeda dalam beragama, salah satunya bisa diajarkan lewat pendidikan akidah yang inklusif. Dalam pembelajarannya, tentu saja memberikan perbandingan dengan akidah yang dimiliki oleh agama lain (perbandingan agama). Pengajaran agama seperti itu, sekaligus menuntut untuk bersikap objektif sekaligus subjektif. Objektif, maksudnya sadar bahwa membicarakan banyak iman secara *fair* itu tanpa harus meminta pertanyaan mengenai benar atau validnya suatu agama. Subjektif berarti sadar bahwa pengajaran seperti itu sifatnya hanyalah untuk mengantarkan setiap peserta didik memahami dan merasakan sejauh mana keimanan tentang suatu agama itu dapat dirasakan oleh orang yang mempercayainya.

4. Pengembangan Materi Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural

Dalam rangka membangun keberagamaan inklusif di sekolah ada beberapa materi pendidikan agama Islam yang bisa dikembangkan dengan nuansa multikultural, antara lain:

Pertama, materi al-Qur'an, dalam menentukan ayat-ayat pilihan, selain ayat-ayat tentang keimanan juga perlu ditambah dengan ayat-ayat yang dapat memberikan pemahaman dan penanaman sikap ketika berinteraksi dengan orang yang berlainan agama, sehingga sedini mungkin sudah tertanam sikap toleran, inklusif pada peserta didik, yaitu a) materi yang berhubungan dengan pengakuan al-Qur'an akan adanya pluralitas dan berlomba dalam kebaikan (Al-Baqarah/2: 148); b) Materi yang berhubungan dengan pengakuan koeksistensi damai dalam hubungan antar umat beragama (al-Mumtahanah/60: 8-9); c) materi yang berhubungan dengan keadilan dan persamaan (an-Nisa'/4: 135)

Kedua, materi fiqih, bisa diperluas dengan kajian fikih siyasah (pemerintahan). Dari fikih siyasah inilah terkandung konsep-konsep kebangsaan yang telah dicontohkan pada zaman, Nabi, Sahabat ataupun khalifah-khalifah sesudahnya. Pada zaman Nabi misalnya, bagaimana Nabi Muhammad mengelola dan memimpin masyarakat Madinah yang multi-etnis, multi-kultur, dan multi-

agama. Keadaan masyarakat Madinah pada masa itu tidak jauh beda dengan masyarakat Indonesia, yang juga multi-etnis, multi-kultur, dan multi-agama.

Ketiga, materi akhlak yang menfokuskan kajiannya pada perilaku baik-buruk terhadap Allah, Rasul, sesama manusia, diri sendiri, serta lingkungan, penting artinya bagi peletakan dasar-dasar kebangsaan. Sebab, kelanggengan suatu bangsa tergantung pada Akhlak, bila suatu bangsa meremehkan akhlak, punahlah bangsa itu. Dalam Al-Qur'an telah diceritakan tentang kehancuran kaum Luth, disebabkan runtuhnya sendi-sendi moral. Agar Pendidikan Agama bernuansa multikultural ini bisa efektif, peran guru agama Islam memang sangat menentukan. Selain selalu mengembangkan metode mengajar yang variatif, tidak monoton. Dan yang lebih penting, guru agama Islam juga perlu memberi keteladanan.

Keempat, materi SKI, materi yang bersumber pada fakta dan realitas historis dapat dicontohkan praktik-praktik interaksi sosial yang diterapkan Nabi Muhammad ketika membangun masyarakat Madinah. Dari sisi historis proses pembangunan Madinah yang dilakukan Nabi Muhammad ditemukan fakta tentang pengakuan dan penghargaan atas nilai pluralisme dan toleranasi.

Materi-materi yang bersumber pada pesan agama dan fakta yang terjadi di lingkungan sebagai diuraikan di atas merupakan kisi-kisi minimal dalam rangka memberikan pemahaman terhadap keragaman umat manusia dan untuk memunculkan sikap positif dalam berinteraksi dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Dalam proses pendidikan, materi itu disesuaikan dengan tingkatan dan jenjang pendidikan. Maksudnya, sumber bacaan dan bahasa yang digunakan disesuaikan dengan tingkat intelektual peserta didik di masing-masning tingkat pendidikan. Untuk tingkat pendidikan lanjutan, materi dipilih dengan menyajikan fakta-fakta historis dan pesan-pesan al-Qur'an yang lebih konkrit serta memberikan perbandingan dan perenungan atas realitas yang sedang terjadi di masyarakat saat ini.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat Wawasan Multikultural dalam PAI

Sebagai sebuah wacana baru, pendidikan Agama Islam berwawasan multikultural tentunya memiliki faktor pendukung dan penghambatnya. Diantara faktor pendukung dikembangkannya pendidikan Agama Islam berwawasan multikultural adalah: (1) adanya landasan kultural dan *theologis* dari al-Qur'an maupun al-Hadits terhadap nilai-nilai multikultural, yaitu: nilai kejujuran dan tanggungjawab (*al-amanah*), keadilan (*al-adalah*), persamaan (*al-musâwah*), permusyawaratan dan demokrasi (*al-syurâ* atau *al-musyawarah)*, nilai solidaritas dan kebersamaan (*al-ukhuwwah*), kasih sayang (*al-tarâkhim* atau *al-talathuf*), memaafkan (*al-'afw)*, perdamaian (*al-shulh* atau *al-silm*), toleransi (*al-tasamûh*) dan kontrol sosial (*amr al-ma'rûf nahy 'an al-munkar*); (2) nilai-nilai multikultural tersebut telah lama dikenal dan diajarkan di lembaga pendidikan Islam, terutama penjelasannya dalam teks-teks klasik (*al-kutub al-mu'tabarâh*) yang lazim digunakan di pondok pesantren; (3) rakyat Indonesia telah memiliki sejarah yang panjang mengenai pluralisme dan multikulturalisme karena bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius dan multikultur, dan; (4) terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai tempat untuk memecahkan kebekuan komunikasi dan kerjasama antar umat beragama di beberapa daerah menjadi angin segar terhadap pemahaman agama yang *inklusif*, toleran dan sejalan dengan semangat pendidikan multikultural.

Sementara yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pendidikan Agama Islam berbasis multikultural adalah: (1) masih merebaknya konflik, baik antarumat agama maupun interumat agama itu sendiri serta fundamantalisme pemikiran yang masih bertahan pada pemikiran lama yang *ekslusif – fundamentalis* dan berpandangan bahwa kelompok (agama) lain adalah sesat sehingga harus disatukan; (2) lebih menonjolnya semangat ke-*ika*-an dari pada ke-*bhineka*-an dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta kurangnya pengakuan terhadap keberadaan dan hak agama, suku dan golongan lain; (3) pengajaran PAI berwawasan multikultural belum terkonsep dengan jelas terkait dengan kurikulum dan metodenya; (4) guru-guru agama Islam di sekolah yang berperan sebagai ujung tombak pendidikan agama nyaris kurang tersentuh oleh gelombang pergumulan pemikiran dan diskursus pemikiran keagamaan di seputar isu

pluralisme, multikulturalisme dan dialog antarumat beragama, dan; (5) kurangnya pemahaman terhadap multikulturalisme dan pluralisme sebagai desain Tuhan (*design of God)* yang harus diamalkan berupa sikap dan tindakan yang menjunjung tinggi multikulturalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. Penutup

Krisis multidimensi yang dialami negeri ini, diakui atau tidak merupakan bagian dari problem kultural yang salah satu penyebabnya adalah keragaman kultur yang ada dalam masyasarakat kita. Keragaman itu sendiri adalah rahamat Tuhan yang dianugerahkan pada bangsa dan negeri ini. Karena dengan begitu, semua kita dapat saling mengenal dan bahu membahu dalam membangun sebuah negeri.

Namun disisi lain, apabila kita tidak dapat melihat sisi positif didalamnya, keragaman itu dapat menjadi salah satu sumber malapetaka yang dapat mengakibatkan adanya kecurigaan dan rasa saling tidak percaya dari satu kelompok terhadap kelompok-kelompok yang lain. Diantaranya adalah diskriminasi, ketidak adilan, dan pelanggaran terhadap hak-hak azasi manusia (HAM) yang terus terjadi hiangga hari ini dengan segala bentuknya seperti kriminalitas, korupsi, politik uang, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengesampingan hak-hak minoritas, pengesampingan terhadap nilai-nilai budaya lokal,,kekerasan antar pemeluk agama dan sebagainya adalah wujud nyata dari problematika kultural yang ada.

Agar tujuan pendidikan multikultural ini dapat dicapai, maka diperlukan adanya peran serta dan dukungan dari guru atau dosen, institusi pendidikan dan para pengambil kebijakan pendidikan lainya. Guru atau dosen perlu memahami konsep dan stategi pendidikan multikultural agar nilai-nilai utama yang terkandung dalam strategi dan konsep pendidikan tersebut seperti pluralisme, demokrasi, humanisme, dan keadilan dapat juga diajarkan sekaligus dipraktekkan dihadapan para siswa sedemikian rupa, seorang guru atau dosen tidak hanya bertanggung jawab agar peserta didik mempunyai

pemahaman dan keahlian terhadap mata pelajaran yang diajarkanya, akan tetapi juga bertanggung jawab untu k menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, keadilan dan pluralisme.

Harapan dari semua ini adalah bahwa institusi pendidikan kita, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, dapat menghasilkan lulusan sekolah atau universitas yang tidak hanya mempunyai kemampuan kognitif (pengetahuan), dan psikomotorik (keterampilan), melainkan juga mempunyai sikap (afektif) yang demokratis, humanis, pluralis dan adil. Untuk mencapai semua itu maka pengajaran harus berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak sekedar memberi informasi atau pengetahuan melainkan harus menyentuh hati, sehingga akan mendorongnya dapat mengambil keputusan untuk berubah. Pendidikan agama Islam, dengan demikian, di samping bertujuan untuk memperteguh keyakinan pada agamanya, juga harus diorientasikan untuk menanamkan empati, simpati dan solidaritas terhadap sesama. Maka, dalam hal ini, semua materi buku-buku yang diajarkannya tentunya harus menyentuh tentang isu pluralitas. Dari sinilah kemudian kita akan mengerti urgensinya untuk menyusun bentuk kurikulum pendidikan agama berbasis multikulturalisme.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Munir Mulkhan dkk., *Religiositas Iptek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

Abdullah Aly, *Pendidikan Multikultural dalam Tinjauan Pedagogik*, dalam http://psbps.org/index.php? option=com_content&task=view&id=60&Itemid=71, diunduh 30 Nopember 2011.

Ainun Hakiemah, *Nilai-nilai dan Konsep Pendidikan Multikultural dalam Pendidikan Islam*, *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007

Ainurrafiq Dawam, *"Emoh Sekolah": Menolak "Komersialisasi Pendidikan" dan "Kanibalisme Intelektual", Menuju Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: INSPEAL Ahimsakarya Press,

Ali Maksum, Ahmad Nur Fuad dan Biyanto (Peny.), *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, Civil Society dan Multikulturalisme*, Cet.I, Malang: PuSAPOM, 2007

Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

Conny Semiawan, *Memelihara Integrasi Sosial dan Menegakkan HAM Melalui Pendidikan Multikultural*, Dalam:*http://www.wahanakebangsaan.org/index.php?option=com_content&task=view&id =42&Itemid=33*, diunduh 30 Nopember 2011

Donna M. Gollnick, *Multicultural Education in a Pluralistik Society*, London: The CV Mosby Company. 1983, dikutip dari: http://www.educationworld.com/a_admin/admin/admin299.shtml, diunduh 30 Nopember 2011

Fahrurrozi, "Nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam Buku Ajar Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Studi Agama Millah*, Vol.IV, No. 2, Januari 2005

Fuaduddin dan Cik Hasan Bisri, *Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi: Wacana tentang Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Logos, 1999

H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan* , Magelang: Teralita, 2003

_____, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Grasindo, 2004

Hamid Hasan, *Pendekatan Multikultural untuk Penyempurnaan Kurikulum Nasional*, dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Edisi Januari-November 2000

Harun Nasuiton, *Islam Rasional: Gagasan Pemikiran*, Bandung: Mizan, 1995

I.J. Piliang, *Menjemput Tahun (Depan) Kekerasan*, dalam *Kompas*, 29 Januari 2003

J. Laluhima, *Hari-hari Terpanjang Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2001

_____, Kompas, "Ambon Manise, Ambon Menangis" dalam *Kompas*,1 Mei 2004

James A. Banks, *Multikultural Education: Characteristics and Goals*, dalam James A. Banks dan Cherry A. McGee Banks (Ed.), *Multikultural Education: Issues and Perspective*,, Amerika: Allyn and Bacon, 1997

Ki Supriyoko, *Pendidikan Masyarakat Multikultural*, dalam *Kompas*, 26 Januari 2004

Leo Suryadinata, dkk, *Indonesia's Population: Etnicity and Religion in a Changing Political Landscape.* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003

M. Ainul Yakin, *Pendidikan Multikultural; Cross-Kultur Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005

Mashudi Umar, *Menampilkan Islam Toleran Melalui Kurikulum, http://pendis.depag.go.id/cfm/index.cfm?fuseaction=KajianBerita&Sub=11&Berita_ID=10515*, akses 30 Nopember 2011

Muhaemin el-Ma'hady, *Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural*, *http://re-searchengines.com/muhaemin6-04.html*, akses 1 September 2011

Muhaimi, et.al, *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama di Sekolah*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002

Muhaimin, *Arah Pengembangan Pendidikan Islam: Pemberdayaan, Pengembangan Kurikulum, hingga Redefinisi Islamisasi Ilmu Pengetahuan*, Bandung: Nuansa, 2003

Ngainum Naim dan Ahmad Syauqi, *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008

Nurani Soyomukti, *Teori-Teori Pendidikan; Tradisional, (Neo) Liberal, Marxis-Sosialis, Postmodern*, Yokyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2010

Parsudi Suparlan. *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*, makalah pada Simposium Internasional ke-3, Jurnal Antropologi Indonesia, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002.

Paul C. Gorsky, "Working Definition: Exchange Multikultural Pavilion", *http://www.exchange.org/multikultural/index.html*, akses 1 September 2011

Rohani, "*Menggugat Pendidikan Agama*", *Magelang Ekspress*, 11 Januari 2011, hlm. 4, *Ibid*, "Menggugat Pendidikan (Agama) Islam" dalam: *http://www.aliman_community.org/index.php?option=com_menggugat_pendidikan_agama=view&id=24&itemid=36* , diunduh 30 Nopember 2011

Sholahuddin, "Humanisasi-Inklusifisasi Pendidikan Islam dalam Konteks Multikulturalisme", *Jurnal Studi Agama Millah*, Vol.V, No. 1, Agustus 2005

Sumartana, dkk., *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001

Sutanto, L., *Menumbuhkembangkan Budaya Perdamaian, Budaya Membantu, Budaya Nirkekerasan*, dalam Makalah pada Konvensi Nasional Kesehatan Jiwa II di Jakarta, 2003.

Syamsul Kurniawan, *Pendidikan di Mata Soekarno; Modernisasi Pendidikan Islam dalam Pemikiran Soekarno,* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2009

Torsten Husen dan T. Neville Postlethwaite (Ed.), *The International Encyclopedia of Education,* Vol.7, England: Elsevier Science Ltd., 1994

Zuly Qodir, "Konflik-Kekerasan SARA di Indonesia: *Dimana Seharusnya Kebijakan Negara*?", *Makalah* Seminar Nasional "Revitalisasi Agama untuk Resolusi Konflik di Indonesia", 14 Maret 2008, Hotel Saphir, Yogyakarta